1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau, perkembangan inflasi pada Triwulan II Tahun 2026 masih berada dalam kondisi yang relatif terkendali. Meskipun demikian, terdapat tekanan harga pada beberapa kelompok pengeluaran, khususnya kelompok makanan, minuman dan tembakau, transportasi, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.

   Pada bulan April 2026, Kabupaten Berau mengalami inflasi Year-on-Year (y-on-y) sebesar 2,19 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,50. Sementara itu, inflasi Month-to-Month (m-to-m) tercatat sebesar 0,50 persen, sedangkan inflasi Year-to-Date (y-to-d) mencapai 1,10 persen.

   Memasuki bulan Mei 2026, laju inflasi mulai menunjukkan tren yang lebih stabil. Tekanan harga masih terjadi pada beberapa komoditas pangan, namun secara umum masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sehingga tidak memberikan tekanan yang signifikan terhadap daya beli masyarakat.

   Secara keseluruhan, perkembangan inflasi selama Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa stabilitas harga di Kabupaten Berau masih terjaga melalui koordinasi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), didukung oleh pemantauan harga secara rutin, pelaksanaan operasi pasar, serta penguatan distribusi pangan.

   - Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (Bapokting)

   Selama Triwulan II Tahun 2026, perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting masih mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi pasokan, distribusi, dan meningkatnya permintaan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

   Komoditas yang memberikan andil terhadap kenaikan inflasi antara lain:

   - Ikan layang/ikan benggol;
   - Ikan kembung;
   - Daging ayam ras;
   - Bawang merah;
   - Tomat;
   - Jagung manis;
   - Minyak goreng; dan
   - Rokok sigaret kretek mesin.

   Kenaikan harga komoditas tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca, biaya distribusi antarpulau, serta meningkatnya konsumsi masyarakat setelah bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.

   Walaupun terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditas, ketersediaan bahan pangan pokok di pasar tradisional maupun pasar modern masih relatif mencukupi sehingga tidak menimbulkan gejolak harga yang berlebihan.

Perkembangan Harga Barang Lainnya

Selain kelompok bahan pangan, beberapa komoditas nonpangan juga mengalami kenaikan harga selama Triwulan II Tahun 2026.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga meliputi:

- Emas perhiasan;
- Bahan bakar rumah tangga;
- Pasir bangunan;
- Sepatu pria;
- Pulsa telepon seluler; dan
- Jasa binatu (laundry).

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar, terutama akibat meningkatnya harga emas perhiasan, jasa potong rambut, pasta gigi, dan pembalut wanita.

1. Perkembangan Harga Jasa

Kelompok jasa juga memberikan kontribusi terhadap inflasi selama Triwulan II Tahun 2026.

Beberapa jenis jasa yang mengalami kenaikan harga antara lain:

- Jasa restoran (nasi dengan lauk, ikan bakar, bakso);
- Jasa transportasi, khususnya tarif angkutan udara;
- Jasa kesehatan, termasuk obat resep dan obat-obatan; serta
- Jasa perawatan pribadi.

Peningkatan permintaan masyarakat selama musim libur dan meningkatnya mobilitas penduduk menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan tarif pada kelompok jasa.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam pelaksanaan pengendalian inflasi daerah selama Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga barang dan jasa di Kabupaten Berau. Permasalahan tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah

Sebagian besar kebutuhan pangan strategis, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng, dan beberapa komoditas hortikultura masih dipasok dari luar Kabupaten Berau. Kondisi ini menyebabkan harga komoditas menjadi rentan terhadap gangguan distribusi maupun kenaikan harga dari daerah asal.

2. Tingginya Biaya Distribusi dan Logistik

Karakteristik geografis Kabupaten Berau yang memiliki wilayah cukup luas serta bergantung

1.

pada transportasi darat, laut, dan udara menyebabkan biaya distribusi relatif tinggi. Kenaikan biaya angkutan maupun keterlambatan pengiriman barang berdampak langsung terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen.

3. Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Segar (Volatile Food)

Komoditas seperti cabai, tomat, bawang merah, sayuran, dan ikan segar masih mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi akibat perubahan cuaca, musim panen, serta kondisi produksi perikanan. Kondisi ini menjadi salah satu penyumbang utama inflasi daerah.

4. Keterbatasan Produksi Lokal

Produksi pangan lokal belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, khususnya untuk komoditas hortikultura dan pangan strategis lainnya. Akibatnya, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah masih cukup tinggi sehingga stabilitas harga sangat dipengaruhi kondisi eksternal.

5. Peningkatan Permintaan pada Periode Tertentu

Meningkatnya permintaan masyarakat pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), libur sekolah, maupun kegiatan ekonomi daerah sering kali menyebabkan kenaikan harga beberapa komoditas apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai.

6. Keterbatasan Sarana Penyimpanan dan Rantai Dingin (Cold Chain)

Fasilitas penyimpanan komoditas pangan, khususnya ikan, daging, dan produk hortikultura, masih terbatas sehingga mempercepat penurunan kualitas barang dan memengaruhi kestabilan pasokan di pasar.

7. Belum Optimalnya Kerja Sama Antar Daerah (KAD)

Meskipun telah dilaksanakan kerja sama antar daerah dalam pemenuhan pasokan pangan, cakupan komoditas dan kontinuitas pasokan masih perlu ditingkatkan agar mampu mengurangi risiko kekurangan pasokan dan gejolak harga.

8. Keterbatasan Informasi Harga Secara Real Tim

Pemantauan harga pasar telah dilakukan secara rutin, namun penyebarluasan informasi harga kepada masyarakat dan pelaku usaha masih perlu diperkuat agar dapat mendukung pengambilan keputusan serta mencegah terjadinya spekulasi harga.

9. Potensi Gangguan Cuaca

Curah hujan yang tinggi maupun cuaca ekstrem berpotensi menghambat aktivitas produksi pertanian, perikanan, serta distribusi barang sehingga dapat mengurangi pasokan dan mendorong kenaikan harga komoditas pangan.

10. Koordinasi Pengendalian Inflasi yang Perlu Terus Diperkuat

Sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, Bulog, distributor, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya telah berjalan dengan baik, namun perlu terus diperkuat, terutama dalam pelaksanaan langkah antisipatif sebelum terjadi gejolak harga.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Berau dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Berau dengan melibatkan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), BULOG, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan difokuskan pada upaya menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, dan memperkuat komunikasi yang efektif kepada masyarakat.

Pelaksanaan pengendalian inflasi mengacu pada strategi nasional 4K, yaitu:

1. **Keterjangkauan Harga**
   - Melaksanakan operasi pasar murah dan Gerakan Pangan Murah pada beberapa kecamatan.
   - Melakukan pemantauan harga harian dan mingguan terhadap komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula pasir, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
   - Berkoordinasi dengan distributor dan pelaku usaha untuk menjaga stabilitas harga serta mencegah praktik penimbunan.
2. **Ketersediaan Pasokan**
   - Melakukan pemantauan stok pangan secara berkala bersama Perum BULOG, distributor, dan dinas teknis.
   - Memastikan kecukupan stok beras, minyak goreng, gula, serta komoditas pangan strategis lainnya, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
   - Mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan hortikultura melalui dukungan sarana dan prasarana kepada kelompok tani dan pembudidaya.
3. **Kelancaran Distribusi**
   - Mengidentifikasi dan mengantisipasi kendala distribusi akibat kondisi cuaca maupun infrastruktur transportasi.
   - Melaksanakan koordinasi lintas sektor guna menjamin kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok ke seluruh wilayah Kabupaten Berau.
   - Mengoptimalkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) sebagai upaya menjaga kesinambungan pasokan komoditas strategis.
4. **Komunikasi Efektif**
   - Menyelenggarakan rapat koordinasi TPID secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan inflasi dan harga pangan.
   - Menyampaikan informasi perkembangan harga dan stok pangan kepada masyarakat melalui media informasi pemerintah.
   - Melaksanakan edukasi kepada masyarakat mengenai belanja bijak, diversifikasi konsumsi pangan, serta pencegahan pemborosan pangan melalui kampanye Gerakan Stop Boros Pangan.

Upaya Penguatan Pengendalian Inflasi

Selain implementasi strategi 4K, Pemerintah Kabupaten Berau juga melaksanakan berbagai

langkah penguatan, antara lain:

- Monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok secara rutin di pasar tradisional maupun modern.
- Pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) bersama unsur TPID menjelang HBKN.
- Penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah kabupaten/kota lain dalam menjaga kelancaran pasokan pangan.
- Optimalisasi pemanfaatan data inflasi dan perkembangan harga dari BPS sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- Peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BULOG, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Berau selama periode pelaporan menunjukkan hasil yang cukup baik melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama seluruh pemangku kepentingan. Berbagai program pengendalian yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian.

Secara umum, strategi pengendalian inflasi yang mengacu pada pendekatan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) telah berjalan dengan baik. Pemantauan harga secara rutin, pelaksanaan operasi pasar murah, koordinasi dengan Perum BULOG, serta penguatan kerja sama antarinstansi mampu membantu menjaga ketersediaan pasokan dan mengurangi gejolak harga pada sejumlah komoditas strategis.

Namun demikian, evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengendalian inflasi, antara lain:

- Fluktuasi produksi komoditas hortikultura akibat pengaruh cuaca dan musim.
- Ketergantungan pasokan beberapa komoditas pangan dari luar daerah sehingga rentan terhadap gangguan distribusi dan kenaikan biaya logistik.
- Tingginya volatilitas harga komoditas pangan seperti cabai, bawang merah, dan beberapa jenis sayuran pada periode tertentu.
- Keterbatasan kapasitas penyimpanan (storage) dan rantai pasok untuk menjaga kontinuitas pasokan pangan.
- Perlunya peningkatan pemanfaatan data harga dan informasi pasar secara lebih cepat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, beberapa langkah perbaikan yang perlu terus diperkuat meliputi:

- Meningkatkan produksi pangan lokal melalui penguatan sektor pertanian, hortikultura, perikanan, dan peternakan.
- Memperluas dan mengoptimalkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna menjamin kesinambungan pasokan komoditas strategis.
- Meningkatkan efektivitas operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah pada wilayah yang mengalami kenaikan harga.
- Memperkuat sistem pemantauan harga dan stok pangan secara real time melalui koordinasi lintas perangkat daerah.

Mengoptimalkan komunikasi publik dan edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijak, diversifikasi pangan, serta pengendalian pembelian secara berlebihan.
- Meningkatkan koordinasi TPID dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bank Indonesia, BPS, Perum BULOG, serta pelaku usaha dalam mengantisipasi potensi tekanan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan periode permintaan tinggi lainnya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Berau telah berjalan efektif dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Ke depan, penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan produksi lokal, perbaikan sistem distribusi, serta pemanfaatan data yang lebih akurat dan tepat waktu menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi selama Triwulan II (April–Juni 2026), kondisi inflasi di Kabupaten Berau relatif terkendali. Ketersediaan bahan pangan pokok secara umum masih mencukupi, namun terdapat fluktuasi harga pada beberapa komoditas hortikultura akibat faktor musiman, cuaca, dan ketergantungan pasokan dari luar daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan yang telah dilakukan.

Adapun rekomendasi kebijakan yang perlu dilaksanakan pada periode berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi (volatile food), khususnya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan komoditas hortikultura lainnya melalui pemantauan harga dan stok secara lebih intensif.
2. Mengoptimalkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan daerah penghasil komoditas pangan strategis untuk menjamin kelancaran pasokan dan mengurangi risiko kenaikan harga akibat keterbatasan produksi lokal.
3. Melanjutkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar secara lebih terarah pada wilayah yang mengalami kenaikan harga, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan periode meningkatnya permintaan masyarakat.
4. Mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui pemberian bantuan sarana produksi, benih, pupuk, alat pertanian, serta pendampingan kepada petani, peternak, dan pembudidaya perikanan untuk meningkatkan ketersediaan pasokan dari dalam daerah.
5. Memperkuat koordinasi TPID dengan Perum BULOG, distributor, dan pelaku usaha guna memastikan ketersediaan stok beras, minyak goreng, gula pasir, serta komoditas strategis lainnya tetap dalam kondisi aman dan distribusinya berjalan lancar.
6. Meningkatkan efektivitas sistem pemantauan harga dan stok pangan berbasis data melalui pelaporan rutin dari perangkat daerah, BPS, dan instansi terkait sehingga potensi tekanan inflasi dapat diantisipasi lebih cepat.
7. Mengoptimalkan komunikasi publik melalui penyampaian informasi perkembangan harga, ketersediaan pasokan, serta edukasi mengenai konsumsi pangan yang bijak dan Gerakan Stop Boros Pangan guna menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi.

-

Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) sebagai dasar penyempurnaan kebijakan pengendalian inflasi pada triwulan berikutnya.

Dengan memperhatikan hasil pelaksanaan pada Triwulan II Tahun 2026, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan produksi pangan lokal, optimalisasi distribusi, serta pemanfaatan data yang akurat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di Kabupaten Berau. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mempertahankan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.